

PERAN AGAMA DALAM PEMBERDAYAAN INTEGRASI NASIONAL

Farhan Muhammad Ismail, Suryo Ediyono

*Email : farhanmuhammad03@student.uns.ac.id,
ediyonosuryo@staff.uns.ac.id Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jawa
Tengah, Indonesia*

ABSTRACT

This study aims to determine the extent to which religion plays a role in maintaining the integrity of the nation and as a solution to various structural and horizontal conflicts in various regions of Indonesia which are caused, among other things, by the application of religious emotional content. transgressed, as did the glorification of tribes and ethnicities that grew. The challenge that we must face together is to consciously and honestly shape the role of religious, moral and ethnic values to promote harmony, unity, social cohesion, national integration and national resilience in the era of globalization. Partnerships between nations and countries must be encouraged in order to promote regional sustainability, because realizing national and regional sustainability seeks to realize the ideals of the nation as contained in the preamble of the 1945 Constitution.

Keywords: Indonesia, Moral, Nation, National, Tribe, Ethnicity

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana agama berperan dalam menjaga keutuhan bangsa dan sebagai solusi atas berbagai konflik struktural dan horizontal di berbagai wilayah Indonesia yang antara lain disebabkan oleh penerapan muatan emosional keagamaan. melampaui batas, seperti halnya pemuliaan suku dan etnis yang tumbuh. Tantangan yang harus kita hadapi bersama adalah secara sadar dan jujur membentuk peran nilai-nilai agama, moral, dan etnis untuk mendorong kerukunan, persatuan, kohesi sosial, integrasi bangsa, dan ketahanan nasional di era globalisasi. Kemitraan antar bangsa dan negara harus digalakkan dalam rangka memajukan kesinambungan daerah, karena mewujudkan kesinambungan nasional dan daerah berupaya mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Kata kunci : Indonesia, Moral, Bangsa, Nasional, Suku, Etnik

PENDAHULUAN

Eksistensi agama khususnya Islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memegang peranan penting dan sentral. Dalam lapisan filosofis universal, Islam memasukkan muatan normative kedalam nilai-nilai spiritual dan moral di dimensi nilai dalam tiga dimensi. Yang pertama ada hubungan dimensi, yaitu umat Islam dengan Allah SWT, umat Islam dengan pemeluk agama lain dan umat Islam dengan lingkungannya. Hubungan ini sesuai dengan pernyataan Al- Qur'an dalam Surat Al-Hujuraat, 13 :“Hai manusia, Kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal.” Dalam konteks kehidupan masyarakat berbangsa, Islam dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan spiritual, moral, dan etika. Sehubungan dengan itu, nilai-nilai spiritual agama khususnya Islam sangat kuat dalam mendorong manusia untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup serta menghilangkan ketakutan, keresahan, serta perlawanan (konflik sosial). Sebagai kekuatan moral dan etika, agama Islam memiliki aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, tentang kebangsaan dan kenegaraan. Terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 9 :“Al-Qur'an sesungguhnya memberikan petunjuk kepada (jalan)

yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang - orang yang beriman. Dalam dimensi lain, A. Nian (1986) menegaskan: Agama dapat menguatkan manusia terhadap dampak negatif perubahan sosial budaya yang semakin kuat dan kompleks. Pada saat yang sama, R. Strothmann dalam B.J. Brifl (1961): Islam bukan hanya sistem agama, tetapi juga sistem politik, dan nabi Muhammad, selain sebagai rasul, juga menjadi anggota negara. Secara makro, hubungan antar manusia adalah agama , Islam dapat dijadikan sebagai inspirasi dan berperan sebagai motivasi bagi pembangunan sosial. Sebaliknya, pada tataran idealisme dengan muatan nilai-nilai spiritual, moral, dan etika dalam proses kehidupan berbangsa, agama memiliki syarat muatan emosional, di sisi lain agama juga menawarkan keimanan dan ketakwaan yang berujung pada kebahagiaan dan kedamaian dalam dunia dan di akhirat-Nya. Di sisi lain, sejarah menunjukkan bahwa kecenderungan negatif muncul sebagai hal yang tak terhindarkan, di mana agama juga dapat mewakili "fanatisme sempit" yang dapat dengan mudah menyebabkan konflik sosial dan bahkan perang, seperti perang salib antara Muslim dan Kristen, konflik antara Kristen dan Katolik, dan Protestan di Irlandia Utara, Muslim dan Hindu di Kashmir. Terkait kondisi tersebut, Sutrisno (1997) menegaskan bahwa perbedaan ajaran

agama yang kemudian menimbulkan kebencian antar umat beragama menjadi penyebab utama munculnya konflik. Oleh karena itu, pendiri bangsa Indonesia secara historis dan politis mengakui peran penting keberadaan agama Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sidney Hook dkk (1987); Islam mengakui bahwa masyarakat adalah bagian dari tujuan, tujuan menjadi makhluk. Islam percaya bahwa individu adalah tujuan dirinya sendiri dan negara adalah sarana untuk mencapai tujuan itu. Secara historis, ajaran agama Islam dapat mendorong umat Islam untuk mengorbankan jiwa dan raganya untuk mengusir imperialisme dan memperoleh kemerdekaan, sedangkan secara politik Islam menempati posisi yang sangat mendasar dalam Pancasila, di mana para pendiri menunjukkan prinsip-prinsip nasionalisme dalam menegakkan kalimat Tuhan Yang Maha Esa. Iman, Soemardjan, sebagai aturan utama. et al. (1992). Selain itu, dalam pembukaan UUD 1945, para pendiri merumuskan kearifan pokok-pokok pikiran berupa implementasi nilai-nilai agama, moral, dan etika seperti; Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya tidak hanya dibimbing oleh keinginan-keinginan yang luhur, kehidupan berbangsa yang merdeka, tetapi juga oleh rahmat Allah SWT. negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang

adil dan beradab. Oleh karena itu, idealnya hukum yang diterapkan di Indonesia mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara yang lainnya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan menjunjung tinggi cita-cita moral luhur rakyat. Amanat awal UUD 1945 yang disoroti di atas kembali ditegaskan dalam batang tubuh Pasal 29 UUD 1945 (1) negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan (2) negara menjamin kemerdekaan. biarlah setiap penduduk menganut agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Dalam penyusunan Pasal 29 (2) UUD 1945, para pendiri menunjukkan kearifan dan toleransi yang besar dengan menyetujui penghapusan pasal tersebut. “Ketika kewajiban menaati syariat Islam atas nama pemeluknya” untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk memahami peran agama dalam pembangunan nasional, setiap GBHN yang ditetapkan oleh MPR RI lebih lanjut mencakup pembinaan kehidupan beragama yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama melalui keimanan, ketaqwaan, dan kerukunan yang dinamis serta peningkatan aktivitas. Partisipasi umat beragama dalam pembangunan. Kehidupan beragama sebagai nilai luhur masyarakat merupakan upaya kolektif untuk meningkatkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan untuk mewujudkan kualitas bangsa

Indonesia seutuhnya yang menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk dirinya sendiri dengan caranya sendiri. gagasan dan memuja agama dan religiusitas. menciptakan kerukunan antar umat beragama. Kita semua harus memahami bahwa kondisi umat beragama Indonesia saat ini semakin dihadapkan pada persoalan dimana agama sebagai landasan spiritual, moral dan etika belum terimplementasikan dengan baik. Kehidupan sosial masyarakat tidak diresapi oleh nilai-nilai agama sehingga menyebabkan kebobrokan moral dan perilaku, serta masih terdapat permasalahan dalam kerukunan internal dan antar umat beragama. hal tersebut menjadi salah satu pemicu munculnya konflik horizontal, seperti yang terjadi di Maluku, Poso, Kupang dan Mataram.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari beberapa langkah yaitu pengumpulan data, kritik, interpretasi dan penulisan. Pada fase ini, kegiatan difokuskan pada pengumpulan dan penyusunan sumber data berupa penelusuran dan rincian, serta pengumpulan fakta sejarah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dapat mencakup wawancara yang memberikan angka tentang jurusan atau jawaban atas

pertanyaan penelitian, serta dokumen, arsip, dan buku harian. Kemudian, pada tahap kerja, kritik atau analisis data merupakan kegiatan menganalisis informasi yang diterima untuk mendapatkan informasi yang otentik. Hal ini terjadi karena objektivitas semua informasi yang diterima tidak dapat dijamin. Hal itu karena ingin menonjolkan suatu kelompok, atau mungkin juga karena daya ingat penulis lemah atau informan hanya mendengarkan cerita orang lain untuk menambah atau mengurangi keakuratan informasi. Pengolahan informasi sebagai fakta membutuhkan kritik sejarah, tujuan umum kritik adalah mengkaji tanggal menjadi fakta. Oleh karena itu, fakta adalah informasi yang diverifikasi, yang kritiknya didasarkan pada keteraturan metode sejarah. Setelah dilakukan kritik sumber, fakta-fakta yang diperoleh diinterpretasikan, tujuannya adalah untuk memberi makna atau makna terhadap peristiwa tersebut. Interpretasi dilakukan dengan menjelaskan fakta sejarah seobjektif mungkin. Penulisan (sejarah) merupakan langkah terakhir dari keseluruhan proses pengolahan dan penyusunan sumber-sumber sejarah, yaitu. menyusun atau menyusun fakta menjadi narasi sejarah. Dalam penulisan karya ini, penulisan sejarah bersifat deskriptif sejarah, berupa uraian-uraian peristiwa sejarah.

PEMBAHASAN

Runtuhnya era Orde Baru dan dimulainya masa reformasi dengan terbukanya kebebasan berekspresi tanpa tudingan subversif - yang kemudian diadopsi oleh UU No. 11/PNPS/1963 - mempengaruhi hubungan antara lain posisi baru atau Hubungan agama dan negara menjadi perbincangan hangat yang hampir tidak bisa didiskusikan secara bebas di forum-forum publik di era Orde Baru. Di sisi lain, masa reformasi yang sebaliknya mendukung kebebasan itu, mendorong warga negara untuk secara bebas dan terbuka menyatakan pendapat, keinginan dan kepentingannya, termasuk pengungkapan ideologinya, yang sangat dibatasi atau ditindas pada masa Orde Baru. Ungkapan tersebut termasuk tindakan yang terlalu bersemangat atau berlebihan yang menimbulkan konflik, pertengkaran dan kekerasan dalam masyarakat, baik itu politik, ekonomi, etnis, agama, dll. Bahkan, konflik ini juga berbentuk konflik vertikal, terutama terorisme dan konflik vertikal. upaya penggantian. ideologi negara dengan ideologi lainnya. Hal ini tentu saja mengancam dan melemahkan integrasi nasional; dan karena itu membutuhkan Upaya untuk mengkonfirmasi.

Hubungan Agama dan Negara

Dalam praktek kehidupan bernegara dewasa ini, hubungan antara agama dan negara dapat dibedakan menjadi

tiga bentuk, yaitu integral (penyatuan agama dan negara), interseksional (persinggungan agama dan negara) dan sekularis (pemisahan agama dan negara). Negara ini membutuhkan proses yang disebut sekularisasi, yang maknanya sangat beragam, termasuk makna yang dipelajari. Menurut Peter L. Berger itu berarti "proses dimana bidang kehidupan social dan budaya dibebaskan dari dominasi lembaga dan simbol agama". Negara-negara yang berlandaskan sekularisme menerapkan pemisahan ini, meskipun bentuk pemisahannya beragam. Sekularisme diberlakukan secara ketat di Perancis dan Amerika Serikat, sedangkan penegakan di negara-negara Barat lainnya umumnya tidak terlalu ketat, sehingga dalam hal-hal tertentu masih ada partisipasi negara dalam urusan agama, seperti adanya partai-partai keagamaan, pendidikan agama, dalam pajak gereja. . dll dll. Seperti dikatakan Alfred Stepan, masih ada beberapa negara Eropa yang masih secara resmi mengakui keberadaan gereja dalam kehidupan bernegara, yang secara eksplisit tertulis dalam konstitusi, seperti Inggris, Yunani dan negara-negara Skandinavia (Norwegia, Denmark, Finlandia).) dan Swedia).) dll.

Sekularisasi politik juga terjadi sehubungan dengan modernisasi politik negara-negara berkembang, termasuk negara-negara Muslim. Namun pada kenyataannya,

sekularisasi ini tidak menghilangkan orientasi keagamaan masyarakat dan negara. Padahal, sejak tahun 1980-an telah terjadi kebangkitan agama di negeri ini dalam bentuk sekularisasi politik dan sosial sebagai lawan dari proses sekularisasi politik tersebut. Kecenderungan sekularisasi ini terjadi tidak hanya di dunia Islam, tetapi juga di banyak negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, karena orang masih membutuhkan nilai-nilai spiritual meskipun hidup dalam masyarakat modern yang mempertahankan rasionalitas. Oleh karena itu, pada akhir 1990-an, sosiolog terkemuka Peter L. Berger merevisi teori yang pernah dia dukung "sekularisasi" dan malah mengajukan teori "sekularisasi di dunia". Dalam konteks Indonesia, baik menurut konsep sistem ketatanegaraan maupun menurut realitas saat ini, hubungan agama dan negara tetap berupa hubungan interseksional antara agama dan negara. Artinya, hubungan antara agama dan negara tidak sepenuhnya terintegrasi atau terpisah sepenuhnya. Itulah sebabnya sering dikatakan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler atau negara agama, melainkan negara demokrasi yang menghormati keberadaan agama di dalam negara. Negara Indonesia secara institusional adalah negara sekuler, namun secara filosofis mengakui keberadaan agama dalam kehidupan bernegara. Agama sebagai dasar negara juga secara tegas disebutkan dalam Pasal 29 Ayat 1

yaitu "Negara didirikan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pengakuan eksistensi agama dalam kehidupan bernegara terutama diungkapkan dalam pengakuan resmi beberapa lembaga agama negara dan inkorporasi nilai-nilai dan norma-norma agama dalam sistem nasional dan keputusan publik. Selain itu, negara juga mengakui keberadaan partai-partai keagamaan dan ormas. Hanya ada satu perkembangan menarik dalam orientasi politik warga negara, yang menggabungkan proses sekularisasi dan desekularisasi pada saat yang bersamaan. Di satu sisi terjadi sekularisasi politik, di mana partai-partai agama (Islam) muncul kembali dan nilai-nilai serta norma-norma agama disesuaikan dengan tatanan masyarakat, di sisi lain arah politik berubah. warga negara (santri) yang tidak otomatis memilih partai politik, tetapi banyak yang memilih partai nasionalis.

Penguatan Integrasi Nasional

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk baik dari segi suku, agama, budaya dan ras. Pluralisme ini dapat menimbulkan perbedaan antar kelompok masyarakat. Itulah sebabnya para founding fathers kita sepakat menjadikan negara kita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke. Karena banyaknya ragam kelompok masyarakat di negara kesatuan

republik Indonesia, maka para founding fathers republik ini juga mencetuskan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Di negara dengan masyarakat majemuk, mencapai persatuan nasional tidaklah mudah karena setiap kelompok memiliki kepentingan dan aspirasi yang berbeda yang dapat menimbulkan konflik di antara mereka. Sebagai masyarakat majemuk, bangsa Indonesia sejak awal dikenal sebagai masyarakat beragama yang damai, bersahabat, rukun dan toleran, bahkan telah menjadi contoh toleransi beragama di dunia. Namun, pada masa Reformasi lebih banyak terjadi konflik antarwarga, termasuk yang berlatar belakang agama, dibanding masa-masa sebelumnya. Demikian pula ekspresi kebebasan juga datang dalam bentuk kekerasan dan radikalisme, yang justru dapat mengganggu kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan membahayakan keutuhan negara kesatuan dan kebhinekaan NKRI.

Padahal, dalam masyarakat yang majemuk ini, masing-masing kelompok bisa saja memiliki aspirasi dan kepentingan yang berbeda-beda, yang dapat berkontribusi pada munculnya persaingan. Apalagi ketika masing-masing kelompok mengembangkan politik identitasnya dan keegoisan kelompok atas nama kebebasan dan realisasi hak asasi manusia. Perbedaan pendapat, perselisihan dan kontradiksi

sebenarnya merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, namun ketika konflik tersebut meningkat menjadi kekerasan, hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih belum beradab.

Selain itu, beberapa kelompok kini juga berusaha mengganti negara Pancasila dengan negara agama dan negara kesatuan Republik Indonesia dengan sistem agama yang dipahami secara sempit, bahkan terkadang dilakukan melalui kekerasan (teror). Mereka sudah berusaha menghidupkan kembali ideologi komunisme yang sebenarnya dilarang dalam Ketetapan MPRS No. 1. XXV Tahun 1966 tentang ajaran PKI dan Komunisme, Marxisme dan Leninisme atas nama hak asasi manusia dan demokrasi. Kembalinya ideologi ini dapat menyebabkan konflik dan kehancuran sosial yang lebih serius daripada yang terjadi di masa lalu.

Oleh karena itu, untuk memperkuat integrasi nasional, berbagai upaya telah dilakukan baik oleh negara atas nama MPR, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun pemerintah, maupun oleh masyarakat, khususnya para tokoh masyarakat. Keberdayaan itu diraih MPR dengan memperkuat empat kesepakatan nasional, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika (Bhinneka Tunggal Ika). Dan UU No 7 Tahun 2012 Tujuan penanganan konflik sosial juga agar bisa cepat menyelesa

ikan masalah ini. Dalam hal ini tokoh masyarakat memegang peranan penting, karena konflik tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengadilan.

Upaya yang sangat penting adalah menghidupkan kembali ideologi sebagai landasan bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk ini. Kebangkitan ini membutuhkan perumusan ideologi Pancasila yang lebih terbuka sehingga pemaknaan Pancasila tidak lagi sesakral dulu. Paradigma baru ini harus mengarah pada pemahaman ideologi yang rasional dan modern, namun tetap dalam filosofi dan konteks masyarakat Indonesia yang religius dan majemuk. Khususnya dalam rangka penguatan integrasi nasional, agama dapat memberikan pengaruh positif bagi kebangkitan ideologi Pancasila. Artinya, agama harus menjadi faktor pemersatu (pemecah) dan bukan malah menjadi faktor pemecah belah (pemecah belah) bangsa. Melalui fungsi tersebut, nilai-nilai agama dan Pancasila menjadi modal sosial bagi kerukunan dan integrasi bangsa. Dan untuk menyelesaikan tugas ini diperlukan pemahaman keagamaan yang moderat dengan mempertimbangkan keadaan objek multi-etnik, multiagama dan multikultural dalam masyarakat Indonesia. Pemahaman seperti itu mengarah pada sikap keberagaman yang moderat dan toleran secara pluralistik, ketimbang

sikap keberagaman yang lebih bersifat absolut dan radikal.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus menerus untuk melawan (counter)radikalisme, baik melalui pendekatan keamanan dan hukum maupun melalui pendekatan agama (teologis). Khususnya dalam kasus radikalisme ideologis, keamanan atau akses hukum saja tidak cukup, karena para pelaku sebenarnya bangga dengan hukumnya dan menganggap diri mereka sebagai pahlawan. Selain memerangi radikalisme, langkah deradikalisasi masih perlu dilakukan, terutama bagi mereka yang sudah berpandangan radikal. Karena radikalisasi terkait dengan banyak faktor, baik agama dan politik, sosial dan ekonomi, upaya deradikalisasi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.

Agama Dan Ketahanan Nasional

Kemerosotan kehidupan bangsa Indonesia harus dipandang sebagai peringatan bagi setiap individu baik tua maupun muda, terutama mereka yang ingin terjun dalam sistem pemerintahan dan telah berkecimpung. Keadaan Indonesia saat ini mendorong semua orang untuk tutup mulut dan menerima semua yang terjadi di negeri ini. Indonesia harus berpikir untuk menghadapi tanda-tanda kehancuran dengan baik. Perubahan zaman semakin menjadi tantangan bagi penduduk Indonesia. Nilai-nilai

yang direpresentasikan sampai saat ini tampaknya tidak lagi berpengaruh banyak terhadap bangsa ini. Individu ingin menemukan jati dirinya di samping kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak daerah yang ingin memecah persatuan bangsa Indonesia. Jikademikian, apa yang akan terjadi ke depan ketika situasi bangsa Indonesia saat ini sedang kacau balau? Bisakah negara ini tetap mempertahankan persatuannya? Begitu banyak pertanyaan yang muncul ketika saya melihat apa yang terjadi di Indonesia. Saran apa? Mengembalikan semangat dan cinta tanah air. Penulis mengkaji ketahanan nasional dari perspektif agama.

Multikultural Agama Dan Ketahanan Nasional

Multikulturalisme agama Indonesia menimbulkan beberapa pertanyaan. Bisakah agama menjadi sumber keamanan nasional? Apa peran agama di Indonesia? Apa hubungan antara satu agama dengan agama lain? Ini adalah satu atau dua pertanyaan yang mungkin membantu menjelaskan peran besar agama di Indonesia dalam membangun ketahanan nasional. Keberagaman agama merupakan keindahan tersendiri, namun di sisi lain, agama juga dapat menjadi sumber konflik di dalam negeri. “Konflik antara agama dan negara biasanya muncul karena agama tidak sesuai dengan ajaran agama, sebaliknya agama ingin

menjadikan negara sebagai negara agama yang selaras dengan agama tertentu, tetapi kemudian mengabaikan agama lain.” Kepentingan tidak hanya mengancam keamanan nasional tetapi juga semakin memperlemah bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Agama tentu memiliki nilai-nilai yang ingin diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, masalah besar muncul ketika agama tidak mengakui agama lain, ketika masalah meningkat sering terjadi perang besar. Agama digunakan untuk merendahkan orang lain. Dalam situasi seperti itu, sulit mewujudkan persatuan dan keluwesan kebangsaan dalam negara Indonesia. Nampaknya agama tidak menjalankan perannya dengan baik di dalam negeri, sehingga mempersulit kerjasama dengan agama lain sehingga menghambat semangat untuk mempersatukan keragaman dan pluralitas Indonesia.

Agama dalam Pancasila

Sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan faktor yang sangat penting dalam menilai dan mempertimbangkan keragaman agama di Indonesia. Pedoman inilah yang menjadi jiwa bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya sebagai warga negara yang ingin bersatu. Urutan pertama diakui dan dihormati serta ingin diwujudkan dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang ada sebelum kemerdekaan. Jika kita kembali ke dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, maka keberagaman agama bukanlah sesuatu yang dapat menjadi sumber masalah, melainkan jalan bagi pemeluk agama apapun untuk mewujudkan ketahanan nasional, yaitu menghargai kekayaan yang dimilikinya, memiliki dan menjadikannya sebagai bahan pelengkap agama-agama lain, dengan tujuan untuk menjaga kebhinekaan dan meningkatkan kekuatan kebhinekaan tersebut.

Agama Penumbuh Cinta Terhadap Tanah Air

Seluruh warga negara Indonesia tentu mempunyai alasan yang memadai terhadap keputusannya untuk memilih agama tertentu. Manusia akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang diperbuat dan dilakukan terhadap negara di akhirat, inilah suatu prinsip yang mendasari manusia melibatkan Tuhan dalam kehidupan bernegara. Manusia hidup dalam negara bukan saja dari sisi kemanusiaan itu sendiri tetapi campur tangan Tuhan menjadi sisi yang harus diperitungkan. Ketuhanan yang dipegang kuat bangsa Indonesia hendaknya juga berakar kuat dalam hati mereka. Negara ini disatukan atas dasar kebaikan Tuhan terhadap setiap individu. Kesadaran baru ini akan

menimbulkan sikap yang barupula terhadap individu yaitu menjadikan individu memiliki cinta tanah air yang kuat, sehingga dengan demikian diminta suatu usaha dan tindakan nyata dalam mencintai tanah air dan negara melalui tatanan negara yang telah diatur bersama. Tantangan negara itu telah dirumuskan dengan begitu formal oleh pemerintah negara. Memang tugas mereka adalah memikirkan hal-hal yang dapat merangsang hati setiap warga negara Indonesia untuk pertama kali memiliki cinta yang mendalam terhadap tanah air. Tanpa cinta ini yang timbul adalah keributan dan kekacauan. Pemerintah membuat peraturan-peraturan yang ditujukan demi kesejahteraan warga negara Indonesia. Peraturan itu dirumuskan bukan secara kebetulan melainkan melalui usaha keras dari pihak pemerintah. Konsekuensinya adalah seluruh masyarakat Indonesia mendukung terwujudnya tata terbib dalam kehidupan sehari-hari. Kesejahteraan dan kesatuan dalam masyarakat akan terwujud apabila dilandasi dengan penghayatan agama yang mendalam dan serius, dalam arti bahwa agama menjadi salah satu bagian yang sangat penting dan mendasari dalam hubungannya dengan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Agama bukanlah segalanya, ia hanyalah salah satu fungsi dalam hidup berbangsa dan bernegara, yang mau ditekankan di sini adalah bahwa agama menjadi

roh penggerak demi berlangsungnya kehidupan negara menuju arah yang lebih baik. Bangsa Indonesia berkeyakinan bahwa hidup yang dilandasi dengan pengahayatan agama yang kuat dan cinta yang mendalam terhadap Tuhan yang diimani akan membawa kerukunan satu sama lain. Menjadi hal yang sangat aneh ketika orang beragama menciptakan perpecahan dan pertikaian dalam negara, merencanakan berbagai macam kejahatan dan mangabaikan orang lain karena fanatic keagamaan. Agama-agama yang telah diakui di Indonesia membawa inti perwartaan masing-masing. Inti perwartaannya adalah membawa keselamatan kepada hidupnya selain itu agama juga dapat memberikan kesejahteraan dan menjadi berkat bagi kehidupan masyarakat dewasa ini.

Agama Sebagai Sumber Ketahanan Nasional

Sebagai sosiolog klasik, Emile Durkheim menawarkan definisi yang menarik tentang peran agama. "Agama didefinisikan oleh peran yang dimainkannya dalam masyarakat, yaitu cara (agama) memberikan kontribusi kepada masyarakat, yang disebut matriks makna. Oleh karena itu, agama adalah sebuah sistem interpretasi dunia yang mengungkapkan pemahaman diri dan tempat serta tanggung jawab masyarakat itu." di alam semesta.

Durkheim menekankan bahwa agama memberi masyarakat pemahaman tentang dunia di sekitarnya. Perubahan mungkin saja terjadi dalam masyarakat, namun agama tetap menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sosial. Agama memainkan peran sentral dan penting dalam masyarakat. Tapi di sini perlu untuk menghindari aturan agama. Agama dapat memiliki banyak interpretasi, dan interpretasi tersebut dapat mempengaruhi masyarakat umum. Agama yang ditawarkan di negara bisa menjadi kompetisi dengan yang lain, agama juga bisa menghibur orang miskin yang mengatakan bahwa selain dunia yang kita tinggali sekarang, ada dunia lain untuk dilihat dan dihidupi. Singkatnya, agama dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Hal ini telah dipegang teguh oleh seluruh warga negara Indonesia dan tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila-Sila Pertama. Agama yang benar-benar dihayati dapat memicu munculnya ketahanan nasional yang kuat. Masyarakat bersatu dalam memahami rasa persaudaraan ini di Indonesia yang sedang berkembang yang tertatih-tatih di ambang kehancuran dan perpecahan.

Penutup

Dalam praktek kehidupan bernegara dewasa ini, hubungan antara agama dan negara dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu

integral (penyatuan agama dan negara), interseksional (persinggungan agama dan negara) dan sekularis (pemisahan agama dan negara). Sekularisme diberlakukan secara ketat di Perancis dan Amerika Serikat, sedangkan penegakan di negara-negara Barat lainnya umumnya tidak terlalu ketat, sehingga dalam hal-hal tertentu masih ada partisipasi negara dalam urusan agama, seperti adanya partai-partai keagamaan, Pendidikan agama, dalam pajak gereja. Seperti dikatakan Alfred Stepan, masih ada beberapa negara Eropa yang masih secara resmi mengakui keberadaan gereja dalam kehidupan bernegara, yang secara eksplisit tertulis dalam konstitusi, seperti Inggris, Yunani dan negara-negara Skandinavia (Norwegia, Denmark, Finlandia). Namun pada kenyataannya, sekularisasi ini tidak menghilangkan orientasi keagamaan masyarakat dan negara. Padahal, sejak tahun 1980-an telah terjadi kebangkitan agama di negeri ini dalam bentuk sekularisasi politik dan sosial sebagai lawan dari proses sekularisasi politik tersebut. Kecenderungan sekularisasi ini terjadi tidak hanya di dunia Islam, tetapi juga di banyak negara di dunia,

termasuk Amerika Serikat, karena orang masih membutuhkan nilai-nilai spiritual meskipun hidup dalam masyarakat modern yang mempertahankan rasionalitas. Dalam konteks Indonesia, baik menurut konsep sistem ketatanegaraan maupun menurut realitas saat ini, hubungan agama dan negara tetap berupa hubungan interseksional antara agama dan negara. Itulah sebabnya sering dikatakan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler atau negara agama, melainkan negara demokrasi yang menghormati keberadaan agama di dalam negara. Negara Indonesia secara institusional adalah negara sekuler, namun secara filosofis mengakui keberadaan agama dalam kehidupan bernegara. Selain itu, negara juga mengakui keberadaan partai-partai keagamaan dan ormas. Hanya ada satu perkembangan menarik dalam orientasi politik warga negara, yang menggabungkan proses sekularisasi dan desekularisasi pada saat yang bersamaan. Di satu sisi terjadi sekularisasi politik, dimana partai-partai agama (Islam) muncul kembali dan nilai-nilai serta norma-norma agama disesuaikan dengan tatanan masyarakat, di sisi lain arah politik berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. 2016. <http://masykuriabdillah.lec.uinjkt.ac.id/home/1/agamadanintegrasinasional> . Diakses 15 Juni 2023
- Hook, Sidney, Rikk. 1987. Hak Azasi Manusia Dalam Islam. Obor Indonesia. Cetakan Jakarta
- Manullang, Ratadiajo. 2012. <https://ratadiajo.wordpress.com/2012/12/14/agamadan-ketahanan-nasional/> . Diakses 15 Juni 2023
- Rasyid Rahman, Abd. 2017. Peran Agama Dalam Memperkuat Integrasi Nasional (Dalam Prespektif Sejarah). Vol. 12, No. 1. 102-104
- Sugardo, Edi. 1996. Memantapkan Integritas Nasional Selama PJPT II. Bina Karya. Jakarta.
- S. Budisanioso, 1996. Ketahanan Nasional Dalam Era Globalisasi. Makalah. Lemhannas. Jakarta, h. 1 – 23